

JEJAK PERJALANAN SEJARAH PERJUANGAN PDRI PERIODE DESEMBER 1948-MARET 1949*

Oleh

Dr. Nopriyasman, M.Hum

Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas,

e-mail: nopriyasman@yahoo.com

A. Pengantar

Bisakah menulis fakta sejarah selengkap-lengkapnyanya tentang PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ? Jelas jawabannya, tidak mungkin. Sebagai sebuah kisah, tentu saja manusia (penulis) mempunyai keterbatasan tersendiri, apalagi tidak semua dari kita terbiasa menuliskan catatan berbagai aktivitas dan praktik kehidupan sehari-hari, sebagai diri sendiri, sebagai kolektif bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paling-paling yang bisa dicapai adalah memberi bentuk pada masa lalu manusia itu. Mungkin atas dasar pemikiran memberi bentuk itu pula, maka Perjalanan Sejarah PDRI yang didiskusikan pada kesempatan ini tetap relevan untuk dibahas. Tentu saja relevansi itu terkait kepada “kebaruan” atau “belum terangnya” suatu aspek dari realitas di pentas sejarah. Terkait kepada hal ini, maka sejarah tentu selalu terbuka untuk ditulis ulang atau dikembangkan sesuai dengan cara berpikir sejarah tersebut. Persoalannya sekarang, apakah buku-buku yang mengisahkan PDRI yang sudah ada dan dipublikasikan belum mencukupi ?

Sampai dewasa ini, salah satu buku penting yang menjadi rujukan bicara PDRI adalah karya Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). Prestasi kreatif ilmiah dari Mestika Zed mendapat

* Makalah ini merupakan pemantik diskusi dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD) Kesadaran bela Negara* dengan topik Bahasan “Penelusuran Kembali Sejarah PDRI”, yang diselenggarakan di Grand Zuri BSD City di Kota Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 9-10 Mei 2021 (Via Daring).

anugerah buku utama IKAPI (Republika, 29 Februari 2000). Pun sebelum buku ini terbit, berbagai diskusi, seminar, buku juga telah membicarakan PDRI, hanya saja gambaran yang komprehensif mengenai PDRI (hingga kini) tidak diragukan adalah buku karya Mestika Zed tersebut. Kalau begitu, mau menulis apalagi ? Paling-paling yang bisa dilakukan adalah pada sapek penegasan terhadap penemuan-penemuan hasil penelitian terdahulu, atau memperbaharui perspektif ?

Salah satu yang bisa menjadi penekanan pembahasan tentang PDRI pasca buku Mestika Zed adalah soal relasi peristiwa masa lalu (PDRI) dengan masa kini. Sebut saja misalnya upaya menemukan makna historis dari sejarah PDRI, atau menemukan semangat dan pantulan pesan dari perjalanan PDRI sebagai penyelamat negara bangsa. Artinya mengisahkan PDRI sebagai kumpulan ide-ide yang menginspirasi masa kini, misalnya pada ideologisasi dan romantisasi revolusi PDRI. Bila itu dilakukan, maka tentu berguna dalam melihat kondisional hubungan berbangsa dan bernegara saat ini (kontemporer), misalnya bagaimana soal kesadaran dan penghargaan terhadap legitimasi negara; soal hubungan pemimpin; soal primordialisme dan golongan; dan soal solidaritas nasional. Bagaimanakah pola perilaku dan gaya wacana patriotisme para pejuang revolusi, khususnya para pemudanya masa-masa PDRI ? Pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari peristiwa-peristiwa selama perjuangan PDRI tersebut ? Dalam kata lain, relevansi untuk keadaan kekinian yang ditonjolkan adalah Sejarah PDRI sebagai hasil rekonstruksi dari dinamika sosial-politik (dahulu dan kini), sehingga dapat menjadi *reservoir* kearifan terhadap permasalahan perjalanan bangsa, suatu kajian yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika jiwa zaman tentunya.

B. PDRI: Simbol Integrasi Nasional dan Partisipasi Sosial-Politik Bela Negara

Kisah PDRI dimulai dengan ditawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai akibat dari agresi Belanda ke II. Kabinet Hatta mengirimkan radiogram yang memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang

berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Kemudian bila Syafruddin gagal, kepada Maramis, Palar, dan Soedarsono diberi pula mandat untuk mendirikan Pemerintah dalam Pengasingan (*gouvernement-inexile*) (Enar, 1978: 211-212). Sementara di hari penyerangan Yogyakarta itu, kota Bukittinggi juga mendapat serangan Belanda. Bukittinggi pada waktu itu memang menjadi benteng kedua setelah Yogya dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Di tengah situasi dan suasana tidak menentu itu, Syafruddin Prawiranegara melakukan rapat darurat bersama pemimpin sipil dan militer di Bukittinggi, guna mengambil langkah-langkah dan menentukan sikap sehubungan perubahan situasi politik dan militer atas penyerangan Belanda yang tiba-tiba itu, dan mengumumkan secara terbatas tentang pembentukan PDRI. Kedua peristiwa rapat itu (Yogyakarta dan Bukittinggi) punya tujuan yang sama, yakni penyelamatan republik.

Sejak Agresi II Belanda (19 Desember), berbagai serangan demi serangan Belanda ke kota-kota penting Indonesia menimbulkan kerapuhan dalam hubungan bernegara, menyebabkan kekuatiran negara Indonesia hilang di muka bumi. Kekuatiran ini tentu sangat beralasan, karena agresi itu terjadi ketika tentara Indonesia masih dalam kondisi serba kekurangan, baik perbekalan atau pun senjata. Pemerintah sipil pun tidak mempunyai rencana yang jelas.

Keadaan tidak menentu membingungkan masyarakat, tentang siapa pimpinan dan pemerintahan ketika tindakan Agresi Belanda berlangsung. Dalam catatan Kepala PEMA (Penyelidikan Masyarakat) Staf Militer Gubernur Sumatera Tengah (1950), disebutkan bahwa hari-hari pertama Agresi ke II terjadi “kepanikan” di kota-kota. Keadaan Bukittinggi misalnya, pada tanggal 21 Desember 1948 menjadi genting, karena Belanda berhasil menembus pertahanan republik di garis demarkasi, dan bergerak ke Bukittinggi melalui Padang Panjang (Kepala Pema, dalam Djohari, 1971: 13). Untuk mengatasi “kerapuhan ini” PEMA mengeluarkan perintah tulisan dan lisan, yang meminta seluruh anggotanya “Sub.Terr.Sumatera Barat T.N.I. Sumatera hendaknya bersebar ke seluruh pelosok Sumatera Tengah”. Anggota Pema diperkenankan memilih

tempat-tempat yang cocok bagi dirinya dan tetap bergerak memimpin BPNK pada setiap nagari dari serangan Belanda (*Ibid.*, 14). Instruksi Pema tersebut, sedikit banyaknya telah memberi arah dan tujuan bagi tindakan penyelamatan, termasuk barang-barang penting (dokumen).

Menurut Taufik Abdullah, setidaknya tercatat tiga tindakan spontan yang terjadi pada awal Agresi II, khususnya dalam soal pentingnya pemerintahan darurat. Spontanitas itu dilandasi kesadaran tidak boleh ada kevakuman pemerintahan, misalnya pemerintah darurat yang di bawah pimpinan Soekiman (didirikan 20 Desember 1949), dan pembentukan pemerintahan darurat militer oleh Kolonel Nasution (Panglima Se-Jawa). Inisiatif mereka didorong oleh kabar yang mereka terima dari radio, bahwa Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda (Abdullah, dalam Asnan, et.al.: 27). Akan tetapi ketika para pemimpin ini mengetahui bahwa mandat telah diberikan ke Syafruddin Prawiranegara, maka mereka pun bergabung dengan PDRI.

Pembentukan PDRI dengan susunan kabinetnya diumumkan tiga hari setelah rapat Bukittinggi, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban (daerah Limapuluh Kota), setelah didapat kepastian bahwa pimpinan negara R.I. telah ditawan. Susunan kabinet PDRI diberi nama “Kabinet Perang”.¹ Tujuan utama PDRI adalah mengkoordinir pemerintahan/perjuangan dan melanjutkan perjuangan gerilya, memupuk moril perjuangan dan semangat rakyat, sehingga kelangsungan Republik Indonesia dapat terselamatkan (Simatupang, 1978: 210). Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI) bersama Wakilnya Teuku Moehammad

¹Susunan Kabinet PDRI (22 Desember 1948) adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara (Ketua/Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan dan Luar Negeri); Mr. T. Mohammad Hasan (Wakil Ketua, merangkap Menteri Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama); Mr. S.M. Rasjid (Menteri Keamanan, merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Perburuhan); Mr. Loekman Hakim (Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman); Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan); Ir. Indratjahja (menteri Perhubungan merangkap Menteri Kemakmuran); Mardjono Danoebroto (Sektetaris PDRI); Letjen. Soedirman (Panglima Besar Angkatan Perang); Kolonel Hidayat (Panglima Territorial Sumatera (PTTS)); Kolonel Nazir (Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)); Kolonel H. Soejono (Kepala Staf Angkatan Udara (KSAL)); dan Komisaris Besar Umar Said (Kepala Jawatan Kepolisian) (Zed, 97: 105; Enar, 1978: 211). Setelah PDRI berhasil kontak dengan Mr. Maramis di New Delhi India, maka Menteri Luar Negeri diserahkan ke Maramis.

Hasan memimpin Kabinet di Sumatera Barat; dan Komando Militer tertinggi di Jawa oleh Jenderal Soedirman. Bersatu padunya pemimpin, turut mendorong perjuangan diplomasi luar negeri semakin efektif, dan tertolaknya kampanye Belanda bahwa Indonesia bubar. Terbentuknya PDRI di Sumatera Barat, maka legitimasi yang konstitusional atas eksistensi negara dapat terselamatkan.

Pada hari-hari awal Agresi Belanda II, para pemimpin baik sipil maupun militer dengan gerak cepat menentukan dasar-dasar pokok dan asas perjuangan. Berbagai inovasi pun dilakukan, dan penyesuaian politik dengan situasi revolusi. Ketika Payakumbuh diduduki Belanda (22 Desember 1948), maka PDRI pindah dari Halaban ke Koto Tinggi. Pada tanggal 23 Desember 1948, Moh. Rasyid sampai di Koto Tinggi. Pada waktu itu, Nagari Koto Tinggi muncul sebagai Pusat Pemerintahan R.I.; Pusat Pemerintahan Sumatera Barat, dan Markas Tentara (Divisi Banteng) (Mansoer, 1970: 259).

Syafruddin Prawiranegara dan rombongan Kabinet PDRI (24 Desember 1948) berangkat menuju tempat pengungsian selanjutnya, yaitu Bidar Alam (Solok Selatan). Rombongan Syafruddin terdiri dari petinggi pusat dengan pengawalan tentara, dan dilengkapi dengan operator stasiun radio (Zed, 1997: 115). Kolonel Hidayat dan Komando Militer Sumatera bergerak ke Utara menuju Aceh untuk membangun markas Komando Sumatera. Sementara itu, Mr. M. Rasyid yang juga anggota PDRI tetap menjalankan pemerintahan Sumatera Barat dari Kototinggi, dekat Suliki, yakni arah utara Payakumbuh (Kahin, 1997: 258). Dalam perjalanan rombongan PDRI itulah, beberapa daerah pernah menjadi tempat persinggahan bagi pemerintahan, sebut saja Bangkinang, Simpang Tiga, Taratak Buluh, Logas, Sungai Durian, Taluk Kuantan, Kiliran Jao, Muara Labuh, Sungai Dareh, Abai Siat, Bidar Alam, Sumpur Kudus, dan Padang Japang.

Sementara itu, di Koto Tinggi, Mohammad Rasyid segera mengeluarkan instruksi kepada bupati-Bupati dan Wedena di Sumatera Barat. Instruksi tersebut tersebut menyangkut berbagai penjelasan soal kedudukan pemerintah yang bersifat mobil, teknis penyampaian berita, dan soal peran Wedena sebagai Ketua MPRK (Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan) di Kewedenaannya (Enar, 1978:

214). Pada tanggal itu juga dikeluarkan instruksi kedua kepada para pamongpraja, jawatan-jawatan dan kepolisian terkait soal telah berdirinya PDRI, mengenai perbekalan yang dikumpulkan dengan sistem gotong royong di setiap nagari, perlunya membantu pengungsi, musyawarah untuk keputusan penting, pemanfaatan BPNK (Badan Pengawal Nagari dan Kota) dalam menjaga hubungan antar kewedanan.

Instruksi pemerintah tersebut berpengaruh pada konsistensi perjuangan karena berarti pemerintah tetap ada yang memimpin dan mengatur jalannya pemerintahan dan perjuangan. Mohammad Rasyid adalah Gubernur Militer (Residen Sumatera Barat) dan Menteri Keamanan PDRI merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Perburuhan. Artinya secara ideologis upaya pananaman kepercayaan dan identitas kenegaraan dengan cepat teratasi sehingga orientasi politik dan *platform* kebijakan pemerintahan semakin jelas. Apalagi mengingat, berbagai kota yang selama ini menjadi pusat perjuangan dan ekonomi perjuangan telah jatuh ke tangan Belanda.

Bukittinggi jatuh dan dikuasai Belanda sejak tanggal 22 Desember 1948. Begitu juga Payakumbuh, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto, Sijunjung dan Batusangkar. Di kota-kota ini Belanda mengatur penyerangan ke berbagai daerah yang masih dikuasai republik. Tujuannya jelas saja ingin menduduki daerah republik itu, melakukan pembersihan pejuang republik, sehingga Republik Indonesia menjadi musnah (*failed state*). Meskipun pada awal penyerangan Belanda mendapat berbagai kemenangan, namun Belanda tidak bisa menguasai seluruh daerah Sumatera Barat. Pemerintah Belanda “kecele”, sebab meskipun ibukota negara (Yogyakarta) sudah diduduki, dan kota-kota penting di Sumatera Barat telah pula dikuasai, namun Belanda tidak pernah benar-benar berhasil menguasai daerah dudukannya. Taktik perang gerilya yang diterapkan pejuang republik berhasil mengacaukan berbagai taktik yang dilakukan Belanda.

Berbagai inisiatif perjuangan diterapkan PDRI, termasuk operasi corak militer. Buktinya, ada pejabat sipil yang diangkat sebagai penguasa militer, dan pejabat lama sebagai komisaris daerah. Sumatera Barat dijadikan daerah militer,

dengan Mr. Moh. Rasyid sebagai Gubernur Militer. Di daerah Aceh ditunjuk Tengku Daud Beureueh. Sumatera Timur dan Tapanuli dengan Gubernur Militer Dr. F.L. Tobing. R.M. Utoyo menjadi Gubernur Militer Riau dan A.K. Gani menjadi Gubernur Militer Sumatera Selatan. Hal ini amat membantu pelaksanaan pertahanan dan efektifnya perjuangan, karena perintah dan instruksi dengan cepat tersampaikan, baik kepada instansi pemerintah, atau pun kepada kesatuan-kesatuan militer. Sistem ini kemudian dikenal juga dengan “perang rakyat semesta” yang melibatkan masyarakat secara total. Rakyat secara intens berpartisipasi dan ambil bagian dalam perjuangan (Enar, 1971: 213; Ahmad Husein, et.al., 1992: 36).

Meskipun corak pemerintahan militer diterapkan, namun tidak mengurangi hak teknis militer dari komandan Sub Territorium Sumatera Barat. Titik berat perjuangan menekankan pada kekuatan dan kesanggupan rakyat bertahan dan menyerang musuh. Rakyat dan tentara menyatu, dengan komando pertempuran tetap pada militer. Pada tanggal 2 Januari 1949, dikeluarkannya Surat Ketetapan PTTS No. WKS/SJ/Ist 038, yang menetapkan daerah Sumatera Barat sebagai daerah militer. Sejak saat itu pula, Mr. Moh. Rasyid mulai mengatur organisasi pemerintahan dengan lebih teratur, dan disesuaikan dengan petunjuk dalam ketetapan PTTS.

Dari perjalanan agresi Belanda ke II dan perlawanan yang diberikan daerah Sumatera Barat, Belanda hanya mendapat kemenangan teknis satu-dua bulan pertama. Sementara itu, pihak republik berhasil dalam strategi dan perjuangan secara politik yang ditandai dengan terlaksananya konsolidasi di antara komponen perjuangan, seperti pemerintahan militer, BPNK/PMT, dan sebagainya. Konsolidasi dan instruksi didukung oleh berbagai Radio yang dimiliki AURI, yang melayani PDRI dan Gubernur Sumatera Barat.

Pemerintah Sumatera Barat waktu itu berada dalam kendali kekuasaan Gubernur Militer, Bupati Militer, Wedana Militer, dan Camat Militer. Mereka diberi pangkat Tituler, sedangkan Kepala Nagari dinamakan Wali Nagari Perang. Eksistensi PDRI mendapat perlindungan penuh dari pejabat pemerintahan

Sumatera Barat, dan roda pemerintahan tetap berjalan sesuai kondisi. Hal ini didukung oleh keberadaan Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) dan Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan (MPRK). MPRD dan MPRK adalah organisasi gerilya yang anggotanya terdiri dari para pemuda yang bergabung dalam Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK).

PDRI memang mengeluarkan ketetapan, bahwa Gubernur Militer diberi tugas rangkap, yaitu mengurus pertahanan dan memegang pemerintahan sipil (Enar, 19778: 221). Tugas rangkap sebagai Gubernur Militer dan Menteri Kabinet PDRI menyebabkan masyarakat melihat bahwa Koto Tinggi tidak saja sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat, tetapi juga sebagai pusat PDRI, namun selama Perang Kemerdekaan II tersebut, anggota PDRI selalu mobil, termasuk Riau dan Jambi.

BPNK menjadi kekuatan perjuangan Sumatera Barat. Para pemuda yang tergabung di sini dilatih secara militer dan belajar perang gerilya. Keberadaan badan ini pula yang menyebabkan Belanda selalu mengalami kesulitan untuk lebih masuk ke pedalaman Sumatera Barat. Penggagas terbentuknya MPRD, MPRK, MPRN, dan BPNK adalah Chatib Sulaiman. BPNK besar andilnya sebagai penghubung badan-badan pemerintah dan militer; pengangkutan barang-barang rombongan petugas pemerintah; penjaga keamanan di pos-pos ronda; dan mata-mata (Djohari, 1971: 38). Para komanda-komandan kesatuan militer pun menyusun tenaga perjuangan di tengah-tengah menghadapi serangan Belanda. Sejak aksi agresi, banyak anggota-anggota kesatuan bercerai berai dari komandannya. Oleh sebab itu penguatan komando dan peningkatan kedisiplinan menjadi suatu keharusan, sehingga semangat perjuangan yang tinggi tetap terjaga.

Pemerintah PDRI kemudian membentuk lembaga Pusat Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P3PDRI). Tujuannya untuk menjamin kelangsungan perjuangan, dan mengusahakan material perjuangan (persenjataan). Beberapa usaha yang dilakukan adalah memungut iuran perang (10%); mencetak uang, memperbanyak senjata, membuat mesiu, bengkel senjata, dan membeli persenjataan. Berbagai taktik dan strategi pun dilakukan dalam

rangka mengganggu pergerakan Belanda, seperti di jalan-jalan besar, mengganggu secara gerilya, menyiarkan pamlet ke daerah musuh, blokade ekonomi ke kota pendudukan Belanda, perang urat syaraf, menghidupkan perekonomian kembali, dan sebagainya (Djohari, 1971: 45).

Di tengah-tengah upaya pemerintah menstabilkan pemerintahan itu, pada tanggal 15 Januari 1949 terjadi Peristiwa Situjuh. Beberapa hari sebelum tragedi itu, para pemimpin melakukan rapat untuk menentukan siasat dan strategi perjuangan. Ternyata rencana itu bocor ke Belanda, sehingga menyebabkan gugurnya pejuang sebanyak 69 orang sebagai akibat tindakan penyerangan tentara Belanda. Beberapa orang yang gugur adalah Chatib Sulaiman (Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah-MPRK), Arisun (Bupati Limapuluh Kota), Kapten Zainuddin "Tembak", Mayor Munir Latif, dan seterusnya. Ketika peristiwa Situjuh terjadi, Syafruddin Prawiranegara sudah berada di daerah Solok Selatan, yaitu Abai Sangir (7 Januari 1949), dan sempat tinggal di sini lebih dari seminggu. Rombongan PDRI (kurang lebih 39 orang) baru tiba di Bidar Alam pada tanggal 14 Januari 1949 (Asnan, et.al. 2006 : 213).

Penyambutan rombongan di berbagai daerah yang dilalui rombongan PDRI dikoordinir oleh Wali Nagari, termasuk penyediaan rumah dan kebutuhan pangan. Penduduk setempat bahu membahu mempersiapkan segala kebutuhan rombongan PDRI. Penjemputan dilakukan oleh anggota BPNK di bawah perintah Wali Nagari. Rombongan disambut dengan gembira, karena daerahnya disinggahi rombongan PDRI. Selama persinggahan, masyarakat diberikan juga penyuluhan, misalnya kesehatan (oleh dr Sumbiyono), dan melakukan rapat-rapat dengan Ninik mamak Nagari. Dalam berbagai kesempatan, rombongan PDRI mengimbau jangan sampai tergoda oleh Belanda yang akan memecah belah bangsa. Ninik Mamak tidak henti memberi pesan moral kepada anak kemenakannya, bahwa PDRI harus ditolong dan dihormati.

Selama kurang lebih tiga bulan (14 Januari 1949-18 April 1949), Nagari Bidar Alam menjadi basis kegiatan Kabinet PDRI. Selama itu pula, setiap lapisan masyarakat menyatu dalam menjaga keamanan (ronda-ronda), BPNK berperan

sebagai badan pertahanan sipil yang komandonya oleh militer, dan memiliki jaringan luas antar nagari. Dapur umum pun disediakan bagi orang-orang penting PDRI, termasuk urusan logistik, dan sebagainya.

Sebagai basis Kabinet PDRI, maka Bidar Alam sekaligus menjadi pusat pemancar PDRI. Stasiun Radio Bidar Alam dipimpin oleh Opsir Udara Dick Tamimi. Stasiun ini diperlengkapi oleh teknisi, telegrafis, dan perwira sandi. Kode panggil disesuaikan dengan nama telegrafisnya yang sedang bertugas, seperti UDO (Udoyo, ZAY (Zainal Abidin), dan KND (Kusnadi). Terkadang juga digunakan *call sign* BKT (Bukittinggi), sehingga sering pula disebut sender Bukittinggi (Zed, 1997: 128).

Stasiun Radio Bidar Alam melakukan siaran malam hari, sekitar pukul 22.00 Wib dan berakhir menjelang pukul 04.00 pagi. Radio ini selalu berkontak dengan sender-sender AURI. Hubungan radio rutin terutama dengan radio AURI di Sumatera dan Jawa. Beberapa perhubungan radio tersebut, misalnya dengan Stasiun Radio Koto Tinggi, yang melayani Gubernur Militer Sumatera Barat; stasiun radio AURI di Sumatera Selatan, stasiun AURI di Riau, Aceh, dan stasiun AURI di Jawa. Berfungsinya stasiun radio PDRI memungkinkan Syafruddin tetap dapat berhubungan dengan daerah luar (Zed, 1997: 129).

Radio penting artinya bagi penyambung lidah bangsa. Hubungan komunikasi yang dilakukan pemimpin republik yang tanpa henti menyebabkan salah satu target Belanda adalah menghentikan dan menghancurkan berbagai sender penyiaran bangsa Indonesia. Kisah-kisah disekitar sarana komunikasi radio ini tentu saja dapat dikembangkan lebih lanjut. Salah satu radio tersebut adalah YBJ-6 (*Yengky Bravo Juliet-6*). Pemancar Radio YBJ-6 selama Perang Kemerdekaan II (Agresi II) beberapa kali pindah lokasi, padahal beratnya sekitar 750 kg. Sifat komunikasi yang dilakukan juga berpindah-pindah, amat tergantung dengan situasi dan kepentingan perjuangan. Rute-rute perjalanan YBJ-6 yang menegangkan telah dimulai dari Bukittinggi, terus ke Halaban (Limapuluh Kota), Pauh Tinggi Nagari Tanjung Bonai (Daerah Lintau), Bodi Balai Tangah (Lintau

Buo), Palo Alai (Seroja), dan Lareh Aia (Nagari Lubuk Jantan) di Kabupaten Tanah Datar.

Di daerah Tanah Datar, Radio YBJ-6 ditempatkan di Rumah Gadang Inyiak Soma di Lareh Aia. Siaran radio ini berhasil ditangkap oleh A.A. Maramis (Menteri Luar Negeri (PDRI) di India melalui pemancar VWX-2 India. Keberhasilan ini memberi arti tersendiri dalam upaya meyakinkan dunia tentang keberadaan pemerintah Republik Indonesia, yang tetap mampu bertahan atas segala gempuran yang dilakukan Belanda. Pada waktu itu, YBJ-6 sekaligus menjadi corong PDRI untuk mendengarkan dan memberi kabar, menerima dan mengirim radiogram serta memonitor berita-berita baik di dalam maupun berita dari Luar Negeri. YBJ-6 tersebut memancar di Lareh Aia, Lubuak Jantan, Lintau Buo Utara (Kabupaten Tanah Datar) selama tiga bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret 1949.²

YBJ-6 juga menyiarkan siaran warta berita, yang dinamakan Siaran Bukit Barisan, sekaligus menetralkan berbagai propaganda Belanda dengan cara siaran kontra propaganda (Buku *Napak Tilas Perjuangan YBJ-6*: 20-21). Namun kemudian terdeteksi lagi oleh Belanda, sehingga YBJ-6 kembali berpindah-pindah secara gerilya sampai terwujudnya kedaulatan Republik Indonesia Desember 1949. Daerah-daerah perpindahan setelah bulan Maret adalah Tanjung Bonai Aur – Tampurungo – Sumpur Kudus – Silantai – Unggan (Wilayah Sijunjung) – Padang Lunggo – Tanjung Lansek – Pamasihan – dan akhirnya kembali ke Halaban. Alat pemancar lainnya yang digunakan untuk menyampaikan semua berita perjuangan di berbagai front pertempuran dan kegiatan PDRI melalui alat pemancar tipe Wireless Set No. 19 MK III Radio serta radio penerima (tipe philip) yang digunakan untuk memantau perkembangan yang terjadi di luar (Zed, 1997: 131).

²Pada bulan September 1989, pemerintah Daerah Sumatera Barat, di bawah Gubernur Hasan Basri Durin Dt. Rangkayo Mulie Nan Kuniang meresmikan peletakan batu pertama pembangunan monumen YBJ-6 di Lareh Air Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. BPCB kemudian menyatakan lokasi tersebut sebagai Daerah Cagar Budaya.

Konsistensi pemberitaan PDRI melalui berbagai radionya, maka Belanda mulai mendapat tekanan dunia internasional, sehingga memaksa Belanda melakukan perundingan. Tentara dengan bantuan rakyat terus melakukan tekanan militer. Di Jawa, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto berhasil pula memberi *impact* politis dan psikologis yang luas, dengan aksi serangannya yang berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam pada tanggal 1 Maret 1949. Sejak saat itu, Belanda mulai mengadakan hubungan pendahuluan dengan R.I.

Selama di Bidar Alam, Syafruddin Prawiranegara selalu memberikan instruksi-instruksi, dan mengkoordinir perjuangan, menginformasikan berita-berita perjuangan ke berbagai front pertempuran. Dari Bidar Alam pula sebagai Ketua PDRI, ia mengusulkan untuk menyempurnakan susunan Kabinet PDRI dengan memasukkan sejumlah nama menteri yang masih aktif di Jawa, misalnya radiogram PDRI tanggal 15 Januari 1949 dan diperkuat lagi tanggal 14 Maret 1949. Penggodokan nama sempat beberapa kali dilakukan lewat radiogram, hingga pada tanggal 31 Maret 1949 terbentuklah susunan kabinet PDRI yang baru, yaitu Syafruddin Prawiranegara (Ketua (Perdana Menteri), merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan); Susanto Tirtoprodjo (Wakil Ketua, merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda); A.A. Maramis (Menteri Luar Negeri); di Sukirman Wirjosardjono (Menteri Dalam Negeri); Lukman Hakim (Menteri Keuangan); I.J. Kasimo (Menteri Kemakmuran, termasuk Persediaan Makanan Rakyat (PMR)); K.H. Masykur (Menteri Agama); Teuku Muhammad Hasan (Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Indratjaja (Menteri Perhubungan); Ir. Mananti Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum); S.M. Rasyid (Menteri Sosial); Letnan Jenderal Soedirman (Panglima Besar APRI); Kolonel Hidayat (Panglima Tentara dan Territorium Sumatera); dan Kolonel A.H. Nasution (Panglima Tentara dan Territorium Jawa) (Imran, et.al., 2003: 118-119). Semakin sempurnanya Kabinet PDRI, maka jalannya pemerintahan semakin kuat, dengan tetap menyesuaikan dengan pola sistem pemerintahan rakyat semesta.

C. Penutup: Cerminan Solidaritas Nasional

PDRI berlangsung kurang lebih delapan bulan. Periode perjalanan PDRI yang dimintakan panitia diskusi, untuk kesempatan pertama ini adalah sampai bulan Maret 1949. Setidaknya dapat dikatakan, bahwa periode Desember hingga Maret itu adalah saat keadaan paling “serba darurat”, namun untungya PDRI berhasil memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan berbagai kekuatan yang bercerai berai, baik di Jawa maupun Sumatera, sehingga diplomasi Luar Negeri bertambah efektif, dan disintegrasi bangsa berhasil dihindarkan. Tokoh-tokoh PDRI memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan menggelorakan perjuangan adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Atas kejadian sejarah yang sebenarnya itulah, kini kita mencari aspek-aspek yang akan dikembangkan untuk diteliti dan diperjelas lebih lanjut. Kiranya makalah ringkas ini benar-benar bisa sebagai pemantik diskusi.

Peristiwa atau jejak PDRI periode April-Juli akan difokuskan pada sesi kedua dari kegiatan “Penelusuran Kembali Sejarah PDRI”. Agar supaya tidak terputus begitu saja, maka sedikit diuraikan perjalanan PDRI setelah bulan Maret, artinya dimulai ketika Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI) menjadikan Sumpur Kudus sebagai basis Pemerintahannya.

Syafruddin Prawiranegara bersama rombongan meninggalkan Bidar Alam menuju Sumpur Kudus (Kabupaten Sijunjung) pada tanggal 23 April 1949 untuk melaksanakan Musyawarah Besar PDRI. Musyawarah berlangsung tanggal 14 – 17 Mei 1949 dengan dikawal sekitar 60 orang Pasukan Moberg dan satu Pleton TNI. Musyawarah berlangsung di rumah Wali Nagari Perang Silantai (dekat Sumpur Kudus dan Unggan). Hadir dalam musyawarah itu anggota PDRI dan staf, Angkatan Perang dan Kepolisian, Kepala-Kepala Jawatan, Gubernur Militer Sumatera Tengah dan staf, Koordinator Sumatera Tengah dan staf, serta pemimpin-pemimpin partai politik lainnya.

Materi musyawarah terkait pada “Pernyataan Roem-Royen” (7 Mei 1949) dan soal strategi mengatasi politik Belanda yang belum dapat dipercaya dan diragukan. Sebagian besar peserta rapat tidak menyetujui perjanjian Roem-Royen

tersebut dan kecewa karena tidak membawa serta PDRI. Namun mengingat situasi negara, baik di bidang politik, ekonomi, dan di bidang strategi, maka Ketua PDRI dengan arif meminta semua peserta rapat untuk dapat menerima, dan ia bersetuju akan menyerahkan mandat kembali. Syafruddin Prawiranegara menekankan, bahwa kita tidak menginginkan bangsa pecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Soekarno-Hatta dan golongan pendukung PDRI, yang tentu saja membahayakan perjuangan dan keutuhan negara dan bangsa (Kahin, 1997: 75-76) Musyawarah Besar Sumpur Kudus melahirkan keputusan bersejarah, yaitu “menyerahkan mandat kembali demi kepentingan persatuan”, sehingga perundingan antara Indonesia dengan Belanda dapat berjalan terus.

Penerimaan peserta musyawarah terhadap langkah yang diambil oleh Syafruddin Prawiranegara, yang dengan besar hati akan menyerahkan mandatnya kembali, menunjukkan sifat kenegarawanan kepada kehidupan berbangsa negara. Pertama, kesadaran dan penghargaan terhadap legitimasi kekuasaan negara, dan kedua berfungsinya *trust*, kepercayaan dan kuatnya dalam hubungan antar pemimpin bangsa. Hal ini menjadi sinyal untuk selalu menempatkan kepentingan bersama, negara, di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Syafruddin Prawiranegara berada di wilayah Sumpur Kudus hingga 19 Juni 1949, setelah itu ia menuju Koto Tinggi dan menjadikan Koto Tinggi kembali sebagai pos komando PDRI. Dengan demikian selama PDRI bergerilya, maka ada beberapa pos komando yang cukup lama Ketua PDRI berdiam di sana mengendalikan pemerintahan, yaitu Bidar Alam (95 hari, dari tanggal 14 Januari 1949 sampai 18 April 1949); kemudian Sumpur Kudus (60 hari, terdiri dari 13 hari di Calau/Sumpur Kudus dari tanggal 22 April 1949 sampai 4 Mei 1949 dan 47 hari di Silantai/Sumpur Kudus dari tanggal 4 Mei 1949 sampai 19 Juni 1949); sedangkan pos komando PDRI di Koto Tinggi berlangsung selama 22 hari, yaitu dari tanggal 19 Juni 1949 sampai 10 Juli 1949. Syafruddin Prawiranegara menyerahkan madatnya dalam rapat kabinet yang dipimpin Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949. Dengan itu berakhirlah riwayat PDRI sebagai pelanjut eksistensi Republik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik. 2006. "PDRI, Kesadaran Sejarah, dan Masa Kini", dalam Gusti Asnan, Syafrizal, Nopriyasman. 2006. *PDRI dalam Sejarah dan Penulisan Sejarah Bangsa*. Padang: Universitas Andalas.
- Asnan, Gusti., et.al., 2003. *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Solok: 1945-1949*. Padang: DHD Sumatera Barat – Pemda Kabupaten Solok.
- Djohari, Sjamsir. 1971. "Peristiwa Situjuh (15 Januari 1949)", *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah-FKPS IKIP.
- Fatimah Enar, et.al. 1978. *Sumatera Barat 1945-1949*. Padang: Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- Husein, Ahmad., et.al. 1992. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950*. Jilid II. Jakarta: BPSIM.
- Imran, Amrin, et.al., 2003. *PDRI Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Citra Pendidikan.
- Kahin, Audrey. 1997. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Jakarta: Angsana Mamanda.
- "Ketimpangan Budaya Melanda Masyarakat Minang", dalam *Republika*. Selasa, 29 Februari 2000.
- Mansoer, M.D. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Mestika Zed, 1997. *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Perumtel. *Napak Tilas Perjuangan Pemancar YBJ-6*
- Simatupang, T.B., 1961. *Laporan dari Banaran*. Djakarta: PT Pembangunan.

Padang, 9 Mei 2021
NP